

**ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
EFEKTIVITAS PROGRAM BAPAK BUNDA ASUH ANAK
STUNTING LIMA PAKET PANTAS (BAKTI PANTAS)
DI KECAMATAN SANGA-SANGA**

Gatra Wahyudi, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* Lima Paket Pantas (Bakti Pantas) di Kecamatan Sanga-Sanga.

Pengarang : Gatra Wahyudi

NIM : 2202016016

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 13 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Kus Indarto, M.AP.
NIP. 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan :	eJournal Administrasi Publik
Volume :	14
Nomor :	1
Tahun :	2026
Halaman :	236-248

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PROGRAM BAPAK BUNDA ASUH ANAK *STUNTING* LIMA PAKET PANTAS (BAKTI PANTAS) DI KECAMATAN SANGA-SANGA

Gatra Wahyudi ¹, Kus Indarto ²

Abstrak

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting Lima Paket Pantas (Bakti Pantas) berupaya menurunkan prevalensi stunting sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bakti Pantas akan berhasil dan berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya komintem pemerintah, dukungan dari tenaga kesehatan dan kader posyandu, dukungan lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pemberian paket intervensi terpadu. Akan tetapi, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang masih belum efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah yang menghambat pendistribusian layanan dan pendampingan secara merata. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan integratif dan kolaboratif lintas sektor agar program dapat berjalan lebih optimal. Kesimpulannya, meskipun telah dilakukan upaya nyata berupa paket intervensi gizi, kesehatan, hingga dukungan lintas sektor, pelaksanaan Program Bakti Pantas belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih perlu dilakukan penguatan kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Balita, Bakti Pantas, Stunting, Efektivitas*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gatrawahyudi698@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu indikator penting adalah status gizi masyarakat, khususnya pada bayi dan balita. Gizi yang tidak tercukupi dapat menimbulkan masalah kronis berupa *stunting*, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas sumber daya manusia di masa depan (Vaivada dkk., 2020).

Pada skala nasional, prevalensi *stunting* masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka *stunting* nasional mencapai 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya (SSGBI 2022 sebesar 21,6%). Target pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Namun, data menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur masih berada di angka 22,3% pada tahun 2024, jauh dari target nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah prioritas dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi. Data menunjukkan penurunan signifikan dari 27,1% pada tahun 2022 menjadi 17,6% pada tahun 2023, meskipun angka ini masih di atas target nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2025). Secara khusus, Kecamatan Sanga-Sanga mencatat prevalensi *stunting* sebesar 23,43% pada tahun 2022, meningkat menjadi 23,72% pada 2023, dan sedikit menurun ke 22,65% pada 2024, namun tetap menunjukkan tren yang belum stabil (Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026).

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meluncurkan program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* Lima Paket Pantas (Bakti Pantas), yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi *Stunting*. Program ini berfokus pada lima paket intervensi terpadu, yaitu kesehatan, pendidikan, sejahtera, pangan, dan tempat tinggal. Evaluasi terhadap program ini penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan (Dunn, 2003).

Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya literasi orang tua terhadap gizi, keterbatasan akses layanan kesehatan, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta faktor geografis dan aksesibilitas wilayah yang menyulitkan distribusi layanan secara merata. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan integratif dan kolaboratif lintas sektor agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Halisah dkk., 2020; Widiyanti & Ainy, 2022; Aisyah dkk., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Upaya tersebut sejalan dengan target nasional percepatan penurunan prevalensi *stunting* menjadi di bawah 14%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pelaksanaan program penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Dye mendefinisikan kebijakan publik yaitu “*whatever government choose to do or not to do.*” Artinya apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Handoyo, 2012). Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (Iriawan, 2024). Easton memberikan perspektif yang sedikit berbeda dengan mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah (Abdoellah dan Rusfiana, 2016). Dari definisi tersebut, diketahui bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan. Edward III menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi (Situmorang, 2016). Menurut Grindle bahwa implementasi adalah proses umum dari sebuah tindakan administratif, dan hal ini bisa diteliti dengan tingkatan program tertentu (Septiana, dkk., 2022). Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik (Pasolong, 2019). Van Meter & Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya (Iriawan, 2022). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai satu hal penting dalam merumuskan

suatu kebijakan, dimana hasil dari evaluasi kebijakan berguna untuk melihat ataupun mencari kekurangan dalam kebijakan yang telah diimplementasikan dan menilai seberapa efektif suatu kebijakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan dengan kebijakan tersebut (Handoyo, 2012). Jones mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap manfaat dari suatu kebijakan (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Muhadjir evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai mengenai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil (Kabul, 2024). Dari definisi di atas, evaluasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur dan menilai efektivitas secara objektif terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan dari suatu kebijakan. Sehingga, evaluasi menjadi bagian penting dari siklus kebijakan, karena mendukung pengambilan keputusan yang berbasis analisis dan data serta mendorong perbaikan kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *World Health Organization* (2015) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial. Menurut Kemenkes RI (2025) *Stunting* adalah gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Casale, dkk. *Stunting* merupakan hasil dari kombinasi faktor gizi yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan anak (Sairah, dkk., 2023). Dampak *stunting* tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Vaivada dkk., 2020). Oleh karena itu, penanganan *stunting* menjadi prioritas kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan Program Bakti Pantas

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meluncurkan program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* Lima Paket Pantas (Bakti Pantas), yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019. Program ini berfokus pada lima paket intervensi terpadu, yaitu Paket Pantas Kesehatan yang menekankan peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan balita; Paket Pantas Pendidikan yang berorientasi pada edukasi gizi dan pola asuh; Paket Pantas Sejahtera yang memberikan dukungan sosial dan ekonomi keluarga; Paket Pantas Pangan yang memastikan pemenuhan gizi melalui akses pangan bergizi dan diversifikasi makanan; serta Paket Pantas Tempat Tinggal yang berfokus pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan lingkungan sehat. Program ini

dirancang untuk menurunkan prevalensi *stunting* melalui pendekatan integratif dan kolaboratif lintas sektor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bapak Bunda Asuh Anak *Stunting* Lima Paket Pantas (Bakti Pantas) di Kecamatan Sanga-Sanga serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait implementasi program. Bogyan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang maupun perilaku yang diamati (Waruwu, 2023). Sejalan dengan itu, Nazir menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi, objek, kelompok, atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang (Roosinda dkk., 2021).

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, diantaranya pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat penerima manfaat. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan menentukan berdasarkan ketentuan atau ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik guna untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga menunjukkan adanya dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai gizi, pola asuh anak, serta pentingnya sanitasi dan layanan kesehatan. Paket Pantas Kesehatan berhasil meningkatkan akses pemeriksaan ibu hamil dan balita, meskipun keterbatasan tenaga kesehatan masih menjadi kendala. Paket Pantas Pendidikan mendorong peningkatan literasi gizi melalui sosialisasi dan edukasi, namun belum menjangkau seluruh keluarga berisiko. Paket Pantas Sejahtera memberikan dukungan sosial berupa bantuan perlindungan keluarga, tetapi distribusinya belum merata. Paket Pantas Pangan berkontribusi pada pemenuhan gizi melalui suplementasi dan diversifikasi makanan, meski akses pangan bergizi masih terbatas. Paket Pantas Tempat Tinggal mendorong perbaikan sanitasi dan akses air bersih, namun faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur menghambat pemerataan layanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan program memiliki faktor pendukung yang memperkuat efektivitasnya, seperti komitmen pemerintah daerah, keterlibatan tenaga kesehatan dan kader posyandu, dukungan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang mengurangi optimalisasi program, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat yang belum maksimal, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya efektif.

Faktor Pendukung

Pelaksanaan Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga tidak hanya menghadapi hambatan, tetapi juga ditopang oleh sejumlah faktor pendukung yang memperkuat efektivitasnya. Keberadaan faktor pendukung ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan program berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

1. Komitmen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan komitmen dalam percepatan penurunan *stunting* melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi *Stunting*. Regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan Program Bakti Pantas sekaligus mendukung kebijakan, pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan program. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Afifah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Temuan ini juga didukung oleh Sairah dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang konsisten mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mempercepat pencapaian target penurunan *stunting*. Selanjutnya, Rahmadani dan Lubis (2023) menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan evaluasi program memperkuat pencapaian target penurunan *stunting*. Dengan demikian, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas Program Bakti Pantas melalui kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang berkelanjutan.

2. Dukungan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Tenaga kesehatan berperan dalam pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi, dan edukasi gizi, sedangkan kader posyandu melakukan pendampingan keluarga serta menjadi penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan Halisah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan dan kader posyandu yang terlatih mampu meningkatkan efektivitas intervensi gizi di tingkat komunitas. Temuan tersebut juga didukung oleh Kemenkes RI (2022) dan Husna, dkk. (2026) yang menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam pemantauan tumbuh kembang anak serta menjembatani komunikasi dengan

masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara tenaga kesehatan dan kader posyandu menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program serta keberhasilan upaya percepatan penurunan *stunting*.

3. Dukungan Lintas Sektor

Program Bakti Pantas melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pangan, dan infrastruktur dalam mendukung peningkatan gizi, perlindungan sosial, penyediaan pangan bergizi, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat pelaksanaan program melalui intervensi yang saling terintegrasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nugraheni dkk. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan penurunan *stunting* sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang efektif. Temuan ini juga didukung oleh Purbaningrum (2023) yang menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor di daerah menjadi penentu keberhasilan program penanggulangan *stunting*. Selanjutnya, Kabul (2024) menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor mampu memperkuat intervensi kesehatan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih komprehensif. Senada dengan itu, Samsuddin dkk. (2023) menyatakan bahwa pendekatan multisektor diperlukan karena *stunting* dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas Program Bakti Pantas melalui intervensi yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan.

4. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan posyandu, edukasi gizi, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga menjadi salah satu kekuatan yang mendukung keberhasilan Program Bakti Pantas. Keterlibatan tersebut mendorong penerimaan terhadap intervensi sekaligus memperkuat perubahan perilaku di tingkat keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Aisyah dkk. (2025) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan berbasis komunitas mampu meningkatkan efektivitas intervensi gizi dan mempercepat penurunan *stunting*. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Sativani dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan keluarga dan kader sangat menentukan keberhasilan pemantauan tumbuh kembang anak, sehingga peran aktif masyarakat menjadi faktor krusial dalam mencapai hasil tumbuh kembang yang optimal. Selanjutnya, Adriani dkk. (2022) menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap gizi anak menjadi faktor penentu keberhasilan program penanggulangan *stunting*. Senada dengan itu, Kemenkes RI (2022) melaporkan bahwa partisipasi aktif keluarga dalam kegiatan posyandu merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan intervensi *stunting*. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas Program Bakti Pantas melalui peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, dan penguatan ketahanan gizi keluarga.

5. Paket intervensi terpadu

Paket intervensi Program Bakti Pantas mencakup lima aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, sejahtera, pangan, dan tempat tinggal. Pendekatan ini

menjadi kekuatan program karena mampu menjawab kebutuhan keluarga secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek gizi, tetapi juga faktor sosial, pendidikan, dan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Vaivada dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa intervensi multisektor lebih efektif dalam menurunkan angka *stunting* dibandingkan intervensi tunggal. Temuan ini juga didukung oleh Kabul (2024) yang menyatakan bahwa paket intervensi terpadu mampu memperkuat efektivitas kebijakan penurunan *stunting*. Selanjutnya, Saputra dkk. (2023) menjelaskan bahwa pendekatan integratif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah terbukti lebih efektif dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Dengan demikian, paket intervensi terpadu dalam Program Bakti Pantas menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program karena mampu menjawab kebutuhan keluarga secara komprehensif melalui intervensi yang saling terintegrasi.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, Program Bakti Pantas memiliki fondasi yang kuat dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada konsistensi komitmen pemerintah, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Pelaksanaan Program *Bakti Pantas* di Kecamatan Sanga-Sanga memang telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi, pola asuh anak, serta pentingnya sanitasi dan layanan kesehatan. Namun demikian, efektivitas program tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi optimalisasi pencapaian tujuan program. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga memengaruhi keberlanjutan intervensi yang dilakukan.

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan tenaga kesehatan, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, serta dukungan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Bakti Pantas sehingga pelayanan pemeriksaan ibu hamil, balita, dan edukasi gizi belum menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Halisah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi faktor penghambat efektivitas program penurunan *stunting*. Temuan ini juga didukung oleh Sairah dkk. (2023) yang menegaskan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran daerah merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program penurunan *stunting*. Selanjutnya, Adriani dkk. (2022) menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan memperlambat upaya pencegahan *stunting*. Senada dengan itu, Wahyuningtias dan Zainafree (2022) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program 1.000 HPK berdampak pada belum optimalnya pencapaian

target penurunan *stunting*. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan anggaran menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bakti Pantas.

2. Koordinasi Antarinstansi Belum Efektif

Meskipun Program Bakti Pantas dirancang dengan pendekatan lintas sektor, koordinasi antarinstansi masih menghadapi kendala, seperti tumpang tindih kegiatan, keterlambatan distribusi bantuan, serta belum optimalnya monitoring terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya terintegrasi. Hal tersebut sejalan dengan Widiyanti dan Aini (2022) yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor yang lemah dapat mengurangi efektivitas kebijakan penurunan *stunting*. Temuan ini juga didukung oleh Purbaningrum (2023) yang menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi yang belum optimal menyebabkan program sering mengalami tumpang tindih. Selanjutnya, Samsuddin dkk. (2023) menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga mengakibatkan pelaksanaan program tidak berkesinambungan. Dengan demikian, penguatan mekanisme koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta monitoring terpadu menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bakti Pantas.

3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas Program Bakti Pantas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang menganggap *stunting* sebagai hal biasa, sehingga kurang aktif mengikuti kegiatan posyandu, menerapkan pola makan bergizi, maupun mendukung perbaikan sanitasi. Hal tersebut sejalan dengan Widiyanti dan Aini (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Temuan ini juga didukung oleh Aisyah dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu menghambat keberhasilan intervensi gizi. Selanjutnya, Phitra dkk. (2023) menegaskan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan posyandu dan edukasi gizi menjadi faktor penghambat pelaksanaan program penurunan *stunting*. Dengan demikian, peningkatan edukasi gizi, kesadaran masyarakat, dan partisipasi keluarga menjadi aspek penting untuk mendukung efektivitas Program Bakti Pantas dalam percepatan penurunan *stunting*.

4. Faktor Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Kondisi geografis Kecamatan Sanga-Sanga yang cukup kompleks serta keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi kendala dalam pemerataan layanan kesehatan, distribusi pangan bergizi, dan pendampingan kepada keluarga sasaran. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau lebih rentan mengalami *stunting*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Vaivada dkk. (2020) yang menyatakan bahwa faktor geografis dan aksesibilitas wilayah memengaruhi keberhasilan intervensi gizi. Temuan ini juga didukung oleh Widiyanti dan Aini (2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya

aksesibilitas wilayah dapat memperlambat pelaksanaan intervensi gizi. Selanjutnya, Nashiri (2024) menegaskan bahwa kondisi geografis berpengaruh terhadap keterjangkauan layanan kesehatan dan distribusi pangan bergizi. Senada dengan itu, Sairah dkk. (2023) menyatakan bahwa wilayah yang sulit dijangkau menjadi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas wilayah serta strategi pelayanan yang menjangkau daerah terpencil menjadi aspek penting untuk mendukung efektivitas Program Bakti Pantas dalam percepatan penurunan *stunting*.

Dengan adanya berbagai faktor penghambat tersebut, efektivitas Program Bakti Pantas belum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan akses layanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga berjalan dengan dukungan kuat dari berbagai faktor, namun juga menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. Faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah yang konsisten, peran aktif tenaga kesehatan dan kader posyandu, sinergi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta penerapan paket intervensi terpadu telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat efektivitas program. Dukungan ini menjadikan intervensi lebih komprehensif dan berkesinambungan, sehingga mampu menjawab kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat secara holistik. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan adanya faktor penghambat yang cukup signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan edukasi gizi, serta tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau. Hambatan-hambatan tersebut sering kali memperlambat pencapaian target penurunan *stunting* dan menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga perlu terus diperkuat dengan strategi yang mampu mengoptimalkan faktor pendukung sekaligus mengatasi faktor penghambat secara sistematis, sehingga tujuan penurunan prevalensi *stunting* dapat tercapai secara efektif, merata, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas Program Bakti Pantas di Kecamatan Sanga-Sanga adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya perlu untuk menambahkan alokasi anggaran khusus bagi program penurunan *stunting*, memperkuat distribusi tenaga kesehatan dan ahli gizi hingga ke tingkat desa/kelurahan, serta melengkapi sarana prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Dengan penguatan sumber daya, intervensi gizi dapat dilakukan lebih merata, tepat sasaran, dan tidak terhambat oleh keterbatasan tenaga maupun fasilitas.
2. Koordinasi antarinstansi belum efektif perlu untuk membentuk forum koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan rutin, menetapkan mekanisme monitoring bersama dengan indikator capaian yang jelas, serta menyusun rencana koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih program. Dengan koordinasi yang lebih efektif, setiap instansi akan memiliki peran yang sinkron, saling melengkapi, dan mendukung pencapaian target penurunan *stunting*.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat perlu untuk meningkatkan edukasi gizi melalui kampanye berbasis komunitas dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, program edukasi gizi berbasis sekolah dan rumah tangga juga perlu untuk dikembangkan. Dengan peningkatan kesadaran dan motivasi, masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan pemantauan tumbuh kembang anak.
4. Faktor geografis dan aksesibilitas wilayah perlu untuk mengembangkan layanan kesehatan berbasis *mobile clinic*, memperkuat transportasi kesehatan di wilayah sulit dijangkau, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemantauan tumbuh kembang anak. Dengan inovasi layanan bergerak dan digital, intervensi gizi dapat menjangkau daerah yang sebelumnya terisolasi, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Y. Awan dan Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Adriani, P., Aisyah, I. S., Wirawan, S., Hasanah, L. N., Idris, Nursiah, A., Yulistianingsih, A., & Siswati, T. (2022). *Stunting Pada Anak*. Padang. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Afifah, A., Salsabila, S., & Erinaldi, E. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(2), 68-81.
- Aisyah, R. D., Suparni, S., & Subowo, E. (2025). Pemberdayaan Kader SMART Stunting (Pencegahan dan Deteksi Pada Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Balita). *Journal of Community Development*, 5(3), 434–445. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i3.289>
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halisah, Unti Nur. P, Irma Irawati. Yuliastina, Roos. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan

- Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 15(2).
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (Ed.)). Widya Karya.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kabul, L. M. U. H. (2024). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 189–195.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Status Gizi SSGI 2022.
- Miles. Matthew B., Huberman. A. Michael, & Saldana. Johnny. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). Arizona State University.
- Nashiri, Muhammad Fahren. (2024). *Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting di Kelurahan Karang Rejo Kota Balikpapan*. (Skripsi). Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Nugraheni, ANS, Nugraheni, SA, & Lisnawati, N. (2020). Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Mineral dengan Kejadian Balita Stunting di Indonesia: Kajian Pustaka. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19 (5), 322–330. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.5.322-330>
- Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus *Stunting* Kabupaten Merangin Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 12(03), 127–141. <http://scholar.unand.ac.id/209674/>
- Purbaningrum, Intan. (2023). *Evaluasi Sistem Penanggulangan Stunting di Kota Samarinda Periode 2021-2023*. (Skripsi). Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka *stunting* berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 188–194. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Sairah, S., Nurcahyani, M., & Chandra, A. (2023). Analisis Penyebab Kejadian *Stunting* pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3840–3849. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4717>
- Septiana. Anis Ribcalia, Suprpto., dkk. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Situmorang, Chazali H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Secururity Development Institute (SSDI).
- Vaivada, T., Akseer, N., Akseer, S., Somaskandan, A., Stefopulos, M., & Bhutta, Z. A. (2020). *Stunting in childhood : an overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline*. 112.
- Wahyuningtias, R., & Zainafree, I. (2022). Evaluasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) Dalam Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja

- Puskesmas Bangsri Ii Kabupaten Jepara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 10(2), 172–177. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i2.32574>
- Widiati, Ilham. Ainy. Asmaripa. (2022). Evaluasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Simpang Periuk Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 11(02), 108–118.